

BAB I

A. Latar Belakang Masalah

Percobaan kudeta yang dilakukan oleh sekelompok militer terhadap rezim Erdoğan pada 15 Juli 2016 merupakan salah satu peristiwa besar yang pernah terjadi di negara Turki. Walaupun kudeta ini hanya terjadi dalam beberapa hari saja tetapi hal ini mengakibatkan adanya perubahan baik dari segi politik dalam negeri turki maupun segi politik internasional. Setelah terjadinya kudeta, pemerintahan Turki langsung mengeluarkan kebijakan penahan terhadap sejumlah pihak yang terlibat termasuk kelompok-kelompok militer dan kehakiman yang selama ini dikuasi oleh kelompok Gülenisme.

Kudeta yang terjadi kali ini merupakan bentuk pertarungan antara rakyat baik kelompok islam maupun sekuler melawan kelompok militer, tidak seperti kudeta-kudeta sebelumnya yang mana pertarungan antara kelompok islam dengan kelompok militer sekuler. Hal ini meyakinkan bahwa rezim Erdoğan dan rakyat Turki merupakan pemenang baru dalam mengatasi ancaman kudeta yang ingin menghilangkan demokrasi yang dibangun sejak lama.

Setelah keadaan negara Turki benar-benar aman dan kondusif, Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan melakukan konferensi pers dan memberikan pernyataan terkait peristiwa kudeta yang terjadi di negaranya. Erdoğan mengatakan bahwa dalang dibalik terjadinya aksi kudeta merupakan pendiri organisasi gerakan islam transnasional dengan unsur-unsur politik *Gülen Movement* yaitu Fethullah Gülen. Fethullah Gülen merupakan penurus Benediuzzaman Said Nursi, dan *Gülen Movement* adalah salah satu cabang Nurcu yang merupakan kelompok islam kultural yang berpandang Apolitis (Saban Hadi, 2018). Hubungan antara Erdoğan dengan Gülen sudah

mengalami keretakan sejak tahun 2011, salah satunya adalah kebijakan Erdoğan terhadap penutupan *dersane* atau lembaga bimbingan belajar yang dianggap sebagai cara Erdoğan memotong rantai pengkaderan *Gülen Movement*. Hal ini juga yang menyebabkan pejabat *Financial and Battle Againsts Criminal Income* yang berisi kader-kader *Gülen* melakukan perlawanan terhadap rezim Erdoğan dengan menangkap pelaku korupsi dilingkarannya dalam Erdoğan. Namun, Erdoğan menganggap bahwa kasus korupsi ini hanya dibuat-buat untuk menjatuhkan dirinya dan pada saat yang sama menganggap bahwa *Gülen* lah yang menjadi dalang dari penangkapan tersebut.

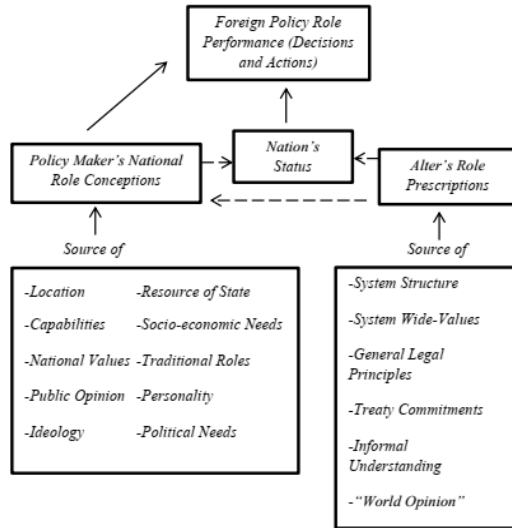
Badan intelejen Turki mengumpulkan data-data dan mengungkapkan fakta bahwa pelaku terjadinya aksi kudeta merujuk pada satu tokoh yang sudah lama menjadi rival dari rezim Erdoğan yakni Fathullah *Gülen* yang pada saat itu menetap di Amerika Serikat. Pemerintah Turki meminta Amerika Serikat untuk mengekstradisi *Gülen* tetapi pemerintah Amerika Serikat meminta bukti tentang keterlibatan Fathullah *Gülen* dan mengatakan bahwa permintaan ekstradisi memerlukan prosedur. Setelah itu, Menteri Kehakiman Turki yaitu Bekir Bozdogan meminta pemerintah Amerika Serikat untuk ekstradisi yang kedua kalinya dengan mengirim dokumen-dokumen berisi permintaan penangkapan *Gülen* dan berharap pemerintah Amerika Serikat memahami tuntutan yang diajukan. Namun, pemerintah Amerika Serikat kembali memberikan berbagai alasan untuk membuat proses ekstradisi tidak terwujud dan hal inilah Turki beranggapan bahwa Amerika Serikat memiliki keterlibatan dibalik upaya kudeta yang terjadi di Turki. Amerika Serikat bahkan mengatakan akan memberikan perlindungan kepada *Gülen*. Akibat dari penolakan inilah membuat hubungan kedua negara menjadi kacau.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana Kebijakan Luar Negeri Turki terhadap Amerika Serikat pasca kudeta pada tahun 2016?

C. Kerangka Teori

Dalam melakukan analisis terkait dengan kebijakan luar negeri Turki terhadap Amerika Serikat pasca kudeta Turki, penulis menggunakan teori yang di populerkan oleh *K.J. Holsti*. Berdasarkan buku yang berjudul *National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy*, dijelaskan bahwa kebijakan luar negeri suatu negara didasarkan pada orientasi negara itu sendiri. Menurut Holsti, orientasi adalah kebijakan, strategi, dan kewajiban umum yang terdiri dari tiga tipe yaitu, orientasi isolasionis, orientasi tidak memihak (*non-alignment*), serta orientasi koalisi dan aliansi. Ketiga orientasi tersebut akan membentuk sebuah konsep *national role* atau peran nasional. Dalam bukunya Holsti, mengemukakan ada 17 konsep *nation role* diantaranya ialah, *bastion of revolution-liberator*, *regional leader*, *regional protector*, *active independent*, *liberation supporter*, *anti imperialist agent*, *defender of faith*, *mediator-negotiator*, *regional-subsystem collaborator*, *developer*, *bridge*, *faithful ally*, *independent*, *example*, *internal development*, *isolate and protectee* (Pilch, 2012). Lewat teorinya, Holsti memberikan empat konsep yang dapat digunakan untuk menganalisis kebijakan luar negeri suatu negara, diantaranya ialah, *Policy Maker's National Role Conception* (Konsep Peran Nasional Pembuat Kebijakan), *Foreign Policy Role Performance* (Performa Peran Kebijakan Luar Negeri), *Nation's Position/Status* (Posisi/Status Negara), dan *Alter's Role Prescriptions* (Preskripsi Peran Alter). Hubungan keempat konsep ini lalu disederhanakan oleh Holsti menjadi sebuah model. Holsti juga menambahkan faktor-faktor yang membentuk *National Role Conception* atau Peran Nasional Negara dan *Alter's Role Prescriptions* atau Preskripsi Peran Alter.



Gambar 1
National Role and

Dalam bukunya, Holsti menjelaskan bahwa *Policy Maker's National Role Conception* atau konsep peran nasional pembuat kebijakan ialah gambaran yang diutarakan oleh Pembuat Kebijakan tentang tujuan atau fungsi yang cocok untuk negara mereka sendiri yang ditujukan kepada lingkungan diluar negaranya. *National Role Conception* adalah aspek pemikiran yang penting dalam pengambilan keputusan luar negeri dalam keseharian suatu negara. *National Role Conception* meliputi definisi Pembuat Kebijakan terhadap segala hal seperti keputusan-keputusan, komitmen-komitmen, peraturan-peraturan, dan tindakan-tindakan yang cocok bagi negaranya, atau fungsi, yang mana merupakan hal yang harus dilakukan untuk keberlanjutan didalam sistem internasional atau didalam sistem regional. *Policy Maker's National Role Conceptions* juga berpotensi dipengaruhi oleh *Alter's Role Prescription* yang berasal dari sumber-sumber dari luar negara tentu termasuk

juga struktur dari sistem internasional; bermacam-macam sistem nilai; prinsip legal yang umum; dan peraturan-peraturan, tradisi, dan ekspektasi negara-negara lain yang tertuang dalam piagam organisasi internasional atau regional, “opini dunia”, perjanjian multilateral maupun bilateral; komitmen tersembunyi dan “pemahaman”.

Foreign Policy Role Performance atau kebijakan luar negeri suatu pemerintahan adalah hasil konsepsi dari para pembuat kebijakan (*Policy Maker's National Role Conceptions*) terhadap tujuan negara mereka sendiri di dalam sistem internasional atau dalam sistem regional. *Foreign Policy Role Performance* juga dapat dijelaskan, utamanya dengan mengacu pada konsep peran bagi suatu negara yang dipikirkan oleh para pembuat kebijakan untuk menghadapi negara-negara dalam cakupan regional maupun internasional. Terdapat faktor-faktor dalam suatu negara yang menentukan pengambilan peran oleh para pembuat kebijakan luar negeri yaitu: lokasi dan kapabilitas alam dari suatu negara; sumber daya alam, sumber daya ekonomi, dan sumber daya teknik; kemampuan yang dimiliki; kebijakan yang bersifat tradisi dari suatu negara; permintaan dan kebutuhan sosial-ekonomi yang diekspresikan melalui partai politik; pergerakan massa, atau kelompok kepentingan; nilai-nilai nasional, doktrin, atau ideologi; tensi opini publik; dan karakteristik atau kebutuhan politik dari para pembuat kebijakan yang utama.

Nation's Status dalam model tersebut dapat memungkinkan ataupun tidak untuk mempengaruhi cara Pembuat Kebijakan mendefinisikan orientasi-orientasi atau tugas yang cocok bagi negaranya yang ditujukan ke dunia internasional, sehingga dapat juga memungkinkan untuk mempengaruhi *Foreign Policy Role Performance* (Holsti, 1970).

K. J. Holsti melakukan penekanan pada definisi dari konsepsi-konsepsi peran nasional dan sumber-sumber domestik dari konsepsi-konsepsi itu. Teori Peran yang diubah ke konteks internasional menawarkan kerangka untuk mendeskripsikan

Foreign Policy Role Performance dan Policy Maker''s National Role Conceptions serta untuk menyelidiki sumber-sumber dari konsepsi peran yang diambil oleh suatu negara .

Dalam kasus Turki, perubahan kebijakan Turki pasca kudeta sangat terlihat jelas dan berdampak pada peran atau *role* serta kebijakan luar negeri yang di keluarkan dalam dunia Internasional maupun dalam negara Turki sendiri. Hal ini bisa dilihat dari kebijakan Erdoğan dalam memecat 21,000 guru dan 15,000 karyawan kementerian dalam waktu sekejap, hal ini merupakan tindakan Erdoğan dalam menghapus penyusup-penyusup pendukung Fethullah Gülen di dalam pemerintahannya. Tak hanya itu, Erdoğan terhitung telah memecat 9,000 polisi, 2,745 hakim, 8,777 kementerian dalam negeri, 1.500 dari kementerian keuangan, 257 staf di kantor perdana menteri serta 100 karyawan di Badan Intelijen Nasional MIT, 300 dari kementerian keluarga dan urusan sosial, dan 492 dari kementerian agama juga turut diberhentikan. Erdoğan bahkan memecat lebih dari 2.000 lembaga yang memiliki hubungan dengan FETO (Saban Hadi, 2018). Kebijakan ini menjadikan *role* Turki sebagai *Defender of Faith*, yang mengacu pada keinginan Turki dalam melindungi nilai sistem negara tersebut dari ancaman. Sesuai dengan yang dijelaskan oleh Holsti bahwa mereka yang mengambil *national role conception* jenis *defender of faith*, melakukan tanggung jawab khusus untuk menjamin kemurnian ideologi dalam suatu negara.

Penolakan ekstradisi Fetullah Gülen oleh Amerika Serikat yang bisa dianggap sebagai *Alter's Role Prescription* juga mempengaruhi peran atau *role* Turki terhadap Amerika Serikat. Turki dikenal sebagai *faithful ally* dengan Amerika semenjak Turki bergabung dengan NATO. Namun, hubungan Turki dan Amerika menjadi kandas akibat dari penolakan ekstradisi Fetullah Gülen oleh Amerika Serikat, bahkan Amerika Serikat mengatakan akan melindungi Fetullah Gülen. Hubungan kedua negara semakin buruk dengan penutupan pangkalan militer Amerika di wilayah Incirlik, Turki yang sering digunakan

Amerika untuk melawan Turki yang notabene adalah bukti kerjasama militer antara Turki dan Amerika Serikat ditambah dengan penangkapan Pastor Amerika Andrew Brunson dan Istrinya Norine Brunson yang dianggap pemerintah Turki memiliki hubungan dengan Fethullah Gülen dan Kurdi. Hal ini membuat *role* Turki sebagai *faithful ally* terhadap Amerika Serikat sudah tidak ada.

Peran atau *role* Turki lainnya adalah *mediator-integrator* yang mengacu pada keterlibatan Turki pada konflik di Suriah. Turki yang awalnya bekerja sama dengan Amerika Serikat mendukung oposisi, berpindah haluan dan bergabung dengan Rusia akibat kekecewaan terhadap Amerika Serikat dan NATO.

D. Hipotesa

Kebijakan luar negeri Turki terhadap Amerika Serikat pasca kudeta adalah:

- 1) Permintaan ekstradisi Fethullah Gülen.
- 2) Penutupan pangkalan militer Amerika Serikat wilayah Incirlik, Turki.
- 3) Penangkapan Pastor Andrew Brunson

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan karya tulis ini adalah untuk:

1. Menjelaskan mengenai kebijakan luar negeri Turki terhadap Amerika Serikat pasca upaya kudeta Turki
2. Menjelaskan mengenai kebijakan Recep Tayyip Erdogan dalam menangani kudeta yang terjadi di Turki
3. Menjelaskan mengenai dinamika kebijakan Turki terhadap Amerika Serikat

F. Metodologi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, saya menggunakan metodologi penelitian berupa kajian data pustaka dari berbagai sumber seperti buku-buku, dokumen-dokumen, laporan-laporan, surat kabar, internet, dan lain sebagainya yang kredibel dan dapat dipertanggung jawabkan. Dimana metodologi penelitian yang saya gunakan dapat disebut sebagai metodologi penelitian yang menggunakan data sekunder sebagai referensi. Jenis penelitian yang saya gunakan adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dan teknik analisis data yang saya gunakan adalah *Purposive Sampling* dan Analisis Domain.

G. Jangkauan Penelitian

Batasan penelitian digunakan untuk mencegah dan menghindari melebarnya pembahasan penelitian. Dikarenakan penulis ingin menjelaskan mengenai bagaimana kebijakan luar negeri Turki terhadap Amerika Serikat pasca upaya kudeta Turki, maka penulis membatasi penelitian di kurun waktu dari tahun 2016-2019. Pada tahun 2016, kudeta terjadi di Turki. Pada tahun 2018, pastor Andrew Brunson bebas dari penjara. Namun tidak menutup kemungkinan akan menggunakan data-data di luar kurun waktu yang ada sebagai alat bantu penulis dalam mengkaji penelitian ini.

H. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

- BAB I : berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, implementasi teori, hipotesa, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II : berisi mengenai dinamika kebijakan Turki terhadap Amerika Serikat sebelum kudeta 2016.
- BAB III : berisi mengenai kebijakan Recep Tayyip Erdogan dalam menangani kudeta yang terjadi di Turki.
- BAB IV : berisi penjelasan mengenai kebijakan luar negeri Turki terhadap Amerika Serikat pasca kudeta pada tahun 2016.
- BAB V : berisi kesimpulan dari penelitian.